

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah secara utuh dimulai sejak Januari 2001. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang sekarang telah direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang No. 32 dan No. 33 Tahun 2004 menjadi awal berjalannya otonomi daerah atau dengan kata lain reformasi pemerintah daerah dan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari kedua undang-undang tersebut yaitu *Desentralisasi Fiskal* (Adisasmita, 2014).

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya (Adisasmita, 2014). Menurut Puspaningsih dan Aryani (2016), salah satu perwujudan otonomi daerah adalah *desentralisasi fiskal*. *Desentralisasi fiskal* merupakan sejenis devolusi dari bentuk kekuasaan sekaligus pertanggungjawaban fiskal kepada daerah oleh pusat guna menurunkan atau menambah angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diperoleh dengan pelaksanaan

desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah (Puspaningsih dan Aryani, 2016).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Maryati dan Endrawati, 2010). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang terlihat adalah bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Seperti, DAU, DAK, DBH, dan dana PAD yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah sebagai dana pembangunan daerahnya. Melainkan digunakan untuk belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2013). Seharusnya pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui aspek-aspek lain seperti peningkatan dana PAD yang semestinya dapat menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah guna dalam peningkatan potensi daerahnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah (Jaya dan Dwirandra, 2014). Menurut Adisasmita (2014), PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Sedangkan menurut Widjaja (2002), dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa dan sektor-sektor lainnya (Setiyawati dan Hamzah, 2007). Tinggi rendah pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tinggi rendahnya tingkat pembangunan daerah. Kemudian pembangunan daerah secara berkelanjutan membutuhkan sumber penerimaan daerah yang berperan aktif dalam menunjang angka pembangunan berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut meliputi, DAU, DAK dan DBH (Puspaningsih dan Aryani, 2016).

Jika peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan DAU, DAK, dan DBH juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena nilai DAU, DAK, dan DBH umumnya lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PAD (Maryati dan Endrawati, 2010). Maryati dan Endrawati (2010) menyatakan bahwa, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berdasarkan tujuan tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian di pemerintah daerah kabupaten dan kota Se-Jawa.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maryati dan Endrawati pada tahun 2010. Penelitian tersebut tidak mencantumkan indikator dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian ini terdapat indikator untuk masing-masing variabelnya. Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), indikatornya berupa manfaat serta sumber-sumber PAD. Dana Alokasi Umum (DAU), indikatornya meliputi tujuan dan manfaat DAU. Dana Alokasi Khusus (DAK), indikatornya seperti tujuan, penetapan dan penggunaan DAK. Dana Bagi Hasil (DBH), indikatornya berupa pembagian dan tujuan DBH. Pertumbuhan ekonomi, indikatornya meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian sebelumnya Maryati dan Endrawati (2010) yang meneliti di Sumatera Barat, bahwa PAD dan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Puspaningsih dan Aryani (2016) yang meneliti di Bali, memperoleh hasil bahwa, DBH berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi. Objek dalam penelitian ini yaitu lingkup pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Jawa. Hal ini berujuan untuk lebih mengoptimalkan pengalokasian PAD maupun dana perimbangan. Agar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dari pada tahun yang sebelumnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada teori yang digunakan. Teori yang di pakai dalam penelitian berdasarkan teori-teori dalam bukunya nordiawan dan rahmawati tahun 2012 serta bukunya widjaja tahun 2002. Berlatar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2011-2014 di Kabupaten dan Kota Se-Jawa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa?
4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa?
5. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik serta tambahan perpustakaan yang sudah ada.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Jawa

Bagi pemerintah sebagai bahan masukan yang berguna bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa untuk dapat

mengoptimalkan pengalokasian pendapatan daerah maupun dana perimbangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, serta Pertumbuhan Ekonomi.

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

